

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan produk perusahaan yang merupakan jendela informasi bagi pihak-pihak diluar manajemen suatu perusahaan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Informasi yang diperoleh dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari laporan keuangan yang bersangkutan.

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Selain itu, pengungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif, terutama yang terkait dengan aspek *risk management*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya informasi yang salah (*disinformasi*) serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan seperti investor, kreditur, dan pemakai informasi lainnya dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang semakin berubah. Pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan *reliable* yang tercermin di dalam pengungkapan perusahaan menjadi faktor penting. Pengungkapan yang detail akan memberikan gambaran kinerja dan operasionalisasi perusahaan yang sesungguhnya (Sidharta dan Juniarti, 2003). Pengungkapan semacam inilah yang nantinya akan menimbulkan kepercayaan dari pihak *stakeholders*, khususnya dalam hal ini pihak

*lender* (pemberi pinjaman) akan kinerja manajemen dan kapabilitas perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986). Selain itu, pengungkapan yang berkualitas akan dapat membantu pihak *lenders* dan *underwriters* (penanggung resiko) dalam mengestimasi resiko kegagalan yang akan dibebankan pada perusahaan (Bill Rees, 1990 dalam Sidharta dan Juniarti, 2003).

Prinsip *corporate governance* tentang *disclosure & transparency*, menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Menurut OECD, terdapat empat hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu, pertama, pengungkapan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada informasi yang material tentang hasil keuangan dan operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara, anggota Dewan Komisaris (*board of directors*) & eksekutif kunci (*key executive*) serta remunerasinya, faktor-faktor resiko material yang dapat diperkirakan, isu material yang berkaitan dengan pekerjaan dan *stakeholders* yang lain, serta struktur dan kebijakan tata kelola (*governance structure & policy*). Kedua, informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan finansial dan non finansial, dan audit yang bermutu tinggi. Ketiga, audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen (auditor eksternal) agar memberikan keyakinan yang memadai dan obyektif atas laporan keuangan (*financial report*) yang disusun dan disajikan oleh manajemen. Keempat, saluran penyebaran informasi (*distribution information*) harus memberikan akses yang wajar (*fair*), tepat waktu (*timely*) dengan biaya yang efisien (*cost efficient*) terhadap informasi yang relevan untuk para pemakai (*user*).

Pada perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak eksternal melalui bursa saham, penyajian laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan di Indonesia, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Laporan tersebut harus diterbitkan melalui media-media massa yang dapat digunakan sebagai sumber informasi penting yang diperlukan oleh pemegang

saham khususnya, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) pada umumnya. Salah satu peraturan yang diterbitkan adalah bahwa emiten wajib mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunan, di antaranya laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada BAPEPAM, bursa efek, serta kepada masyarakat secara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti, dan obyektif.

Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Darrough, 1993). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan, pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Menurut peraturan mengenai laporan keuangan yang ada di Indonesia, hal semacam ini dimungkinkan.

Pengungkapan sukarela merupakan keputusan manajemen yang cukup sensitif yang dapat mengungkap informasi internal kepada para pemegang saham dan juga para pesaing. Implikasi dari pengungkapan perusahaan yang dilakukan (contoh: interpretasi sinyal yang diberikan oleh manajemen) akan mempengaruhi kemampuan pemegang saham untuk membuat penilaian atas keputusan investasinya di perusahaan tersebut berdasarkan informasi yang diungkapkan perusahaan. Namun, jika kita melihat bahwa karakteristik kepemilikan perusahaan di negara-negara Asia yang umumnya memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi di mana kebanyakan pemilik perusahaan juga merupakan bagian dari manajemen (*insider owners*), maka informasi yang diungkapkan dapat dipersepsikan oleh *outside investors* hanya untuk kepentingan *inside owners*. Lebih jauh, pengungkapan yang dilakukan juga akan mempengaruhi kemampuan para pemegang saham untuk menilai langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk kepentingan pemegang saham.

Xiao dan Yuan (2007) memaparkan bahwa pengungkapan sukarela perusahaan dan determinan-determinannya merupakan area penelitian yang dianggap penting dan telah menarik perhatian para peneliti analitis dan peneliti

empiris sejak tahun 1970-an. Penelitian-penelitian analitikal yang telah dilakukan antara lain meliputi *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), *signaling theory* (Hughes, 1996), dan *competition theory* (Verrechia, 1983). Penelitian empiris pada determinan-determinan yang mempengaruhi pengungkapan sukarela bercabang pada dua aliran utama, yaitu mendokumentasikan pengaruh dari karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan, pencatatan di bursa (*listing*), *leverage*, *profit* dan pertumbuhan (*growth*); dan melihat pengaruh *corporate governance*, termasuk struktur kepemilikan dan komposisi dewan (dewan komisaris dan dewan direksi) terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Pada tahun 2003, Eng dan Mak melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur kepemilikan dan komposisi *Board of Directors* (BoD) dengan tingkat pengungkapan sukarela. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan oleh jajaran manajerial, kepemilikan yang terpusat, dan kepemilikan pemerintah. Tingkat pengungkapan sukarela relatif tinggi pada perusahaan dengan proporsi kepemilikan oleh jajaran manajerial kecil dan kepemilikan pemerintah yg signifikan. Variabel kepemilikan terpusat tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan sukarela perusahaan dengan BoD yang sebagian besar berasal dari luar perusahaan, dan hal tersebut cenderung mengurangi informasi yg diungkapkan secara sukarela. Eng dan Mak menyimpulkan hal ini terjadi karena terdapat peningkatan independensi BoD sehingga kebutuhan akan pengungkapan informasi sukarela menjadi berkurang. Perusahaan-perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela. Lakhall (2005) melakukan penelitian yang mempelajari hubungan antara pengungkapan sukarela dan set kombinasi atribut-atribut *corporate governance* di Prancis. Ia menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Prancis yang kepemilikan institusional asing-nya lebih tinggi cenderung melakukan pengungkapan sukarela.

Xiao dan Yuan (2007) meneliti pengaruh struktur kepemilikan, independensi direktur, dan dualitas CEO terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Cina. Mereka menemukan bahwa kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan asing memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan pengungkapan; kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan

kepemilikan perorangan tidak berpengaruh pada pengungkapan; perusahaan-perusahaan besar memiliki tingkat pengungkapan yang lebih luas, sedangkan perusahaan-perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi cenderung enggan untuk melakukan pengungkapan.

Di Indonesia sendiri, Marwata (2001) melakukan penelitian untuk menguji ukuran perusahaan (direpresentasikan oleh jumlah aset), *leverage*, likuiditas, basis perusahaan, penerbitan sekuritas, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan umur emiten. Hasil pengujian menunjukkan hanya variabel ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas yang memiliki hubungan signifikan dengan luas pengungkapan sukarela. Marwata menyimpulkan bahwa besarnya kepemilikan asing tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan karena relatif kecilnya kepemilikan asing pada sample penelitian.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada pelaporan sukarela perusahaan?
2. Apakah kepemilikan *blockholder* berpengaruh pada pelaporan sukarela perusahaan?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh pada pelaporan sukarela perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada pelaporan sukarela perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.
2. Menganalisa pengaruh kepemilikan *blockholder* terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

3. Menganalisa pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.
4. Menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

#### **1.4 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada pengungkapan dalam laporan tahunan 2007 perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang dianalisa terbatas pada data sekunder. Selain itu, penulis hanya menganalisa kelengkapan informasi laporan tahunan, tidak termasuk kualitas informasi dalam laporan tahunan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi ilmu serta memperoleh gambaran umum mengenai praktek pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana dampak struktur kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan, pasar modal serta aktivitasnya.

##### **2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Xiao dan Yuan (2007) pada perusahaan-perusahaan publik di Cina. Namun, terdapat beberapa perbedaan, antara lain penulis lebih spesifik meneliti pengungkapan sukarela pada industri manufaktur. Dalam penelitian ini terdapat penyesuaian indeks pengungkapan sukarela dengan indeks pengukuran yang dipakai dalam penelitian mengenai pengungkapan di Indonesia serta menyesuaikan dengan peraturan Bapepam yang dikeluarkan pada tahun 2002 yang mengatur pengungkapan perusahaan-perusahaan industri manufaktur dan peraturan Bapepam tahun 2006 mengenai pengungkapan wajib perusahaan secara umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi penelitian tentang obyek yang sejenis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri atas 5 (lima) bab dan antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, dan hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai model penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan penentuan sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, pengujian asumsi klasik, teknik analisa data, dan teknik pengujian hipotesis.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh beserta analisis statistik dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil akhir penelitian untuk penelitian selanjutnya.